



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 September 2021
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penetapan Pagu Anggaran menjadi Pagu Alokasi Anggaran RAPBN Tahun 2022
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 40 (empat puluh) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI; C. Ketua Dewan Penyelenggara Pemilu; D. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan; E. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI; dan F. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Dewan Penyelenggara Pemilu, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dengan agenda penetapan Pagu Anggaran menjadi Pagu Alokasi Anggaran RAPBN Tahun 2022, hari Selasa, 21 September 2021, dibuka pukul 15.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Dewan Penyelenggara Pemilu, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dengan agenda penetapan Pagu Anggaran menjadi Pagu Alokasi Anggaran RAPBN Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2022 sebesar **Rp3.034.904.881.000,- (tiga trilyun tiga puluh empat milyar sembilan ratus empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp18.480.629.000,- (delapan belas milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian ATR/BPN Tahun 2022, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar **Rp146.626.418.000,- (seratus empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)**.
 - b. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar **Rp476.338.543.000,- (empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)**.
 - c. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar **Rp460.065.243.000,- (empat ratus enam puluh milyar enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)**.
 - d. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.951.874.677.000,- (satu trilyun sembilan ratus lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)**.
2. Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar **Rp.2.929.368.529.000,- (dua trilyun sembilan ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**, termasuk didalamnya usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp49.283.737.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)**.

3. Kepala BNPP menyampaikan Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp247.680.529.000,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP Tahun 2022, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp199.209.220.000,- (seratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)**.
 - b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar **Rp48.471.309.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)**.
4. Ketua KPU menyampaikan Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) tahun 2022 sebesar **Rp2.452.965.805.000,- (dua trilyun empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) KPU RI Tahun 2022, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.947.050.615.000,- (satu trilyun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar lima puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)**
 - b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp505.915.190.000,- (lima ratus lima milyar sembilan ratus lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)**.
5. Ketua KPU menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU RI sebesar **Rp5.608.119.929.000,- (lima trilyun enam ratus delapan milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**.
6. Ketua Bawaslu menyampaikan Pagu Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) tahun 2022 sebesar **Rp1.982.860.804.000,- (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Bawaslu RI Tahun 2022, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.408.637.827.000,- (satu trilyun empat ratus delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**.

- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp574.222.977.000,-** (lima ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
7. Ketua Bawaslu menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI sebesar **Rp3.653.115.238.000,-** (tiga trilyun enam ratus lima puluh tiga milyar seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Dewan Penyelenggara Pemilu, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dengan agenda penetapan Pagu Anggaran menjadi Pagu Alokasi Anggaran RAPBN Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2022 sebesar **Rp3.034.904.881.000,-** (tiga trilyun tiga puluh empat milyar sembilan ratus empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp18.480.629.000,-** (delapan belas milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kemendagri Tahun 2022, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar **Rp146.626.418.000,-** (seratus empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
 - b. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar **Rp476.338.543.000,-** (empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
 - c. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar **Rp460.065.243.000,-** (empat ratus enam puluh milyar enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
 - d. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.951.874.677.000,-** (satu trilyun sembilan ratus lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar **Rp.2.929.368.529.000,-** (dua trilyun sembilan ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), termasuk didalamnya usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp49.283.737.000,-** (empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp247.680.529.000,-** (dua ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP Tahun 2022, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp199.209.220.000,-** (seratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar **Rp48.471.309.000,-** (empat puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)
4. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) tahun 2022 sebesar **Rp2.452.965.805.000,-** (dua trilyun empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) KPU RI Tahun 2022, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.947.050.615.000,-** (satu trilyun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar lima puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
 - b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp505.915.190.000,-** (lima ratus lima milyar sembilan ratus lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
5. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU RI sebesar **Rp5.608.119.929.000,-** (lima trilyun enam ratus delapan milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan meminta kepada Badan

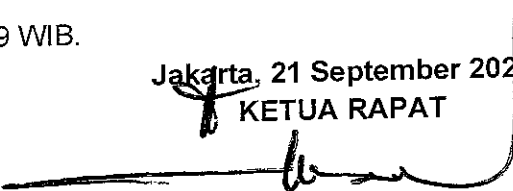
Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

6. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) tahun 2022 sebesar **Rp1.982.860.804.000,- (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Bawaslu RI Tahun 2022, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.408.637.827.000,- (satu trilyun empat ratus delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**
 - b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp574.222.977.000,- (lima ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)**
7. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI sebesar **Rp3.653.115.238.000,- (tiga trilyun enam ratus lima puluh tiga milyar seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
8. Terhadap persetujuan Komisi II DPR RI atas Pagu Anggaran Definitif menyangkut alokasi di internal Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian secara proposional sesuai dengan prioritas kebijakan dan program.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.19 WIB.

Jakarta, 21 September 2021
KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH.

A-142